

LAKIP



2023

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA AMBON**

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telp. (0911) 353546 Kode Pos 97124

www.ambon.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja serta sasaran dengan target yang telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan menginformasikan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon Tahun 2023.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menyusun strategi kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan pelayanan publik.

Ambon, Januari 2024

**Pt. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA AMBON**



Ronald H Lekransy, ST. M.Si
NIP. 19760730 200604 1 020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan melalui :

Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi public penyelenggaraan pemerintah dengan **Indikator Persentase pembentukan, capaian KIM ditingkat desa/kelurahan/negeri** kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 0%, **Indikator Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah** kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 114.91%, **Indikator Persentase Pemanfaatan media social oleh OPD** sampai bulan Desember 2023 adalah 219.67%, **Indikator Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah capaian kinerja** sampai bulan Desember 2023 adalah 191.31%, **Indikator Persentase Integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah** sampai bulan desember 2023 capaian kinerjanya adalah 164.78%.

Sasaran : Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah dengan indikator **Persentase penyediaan sertifikat elektronik** sampai bulan desember 2023 aoaian kinerjanya adalah 65.03%,

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah dengan indikator **Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah** sampai bulan desember 2023 aoaian kinerjanya adalah 287.87%,

Keberhasilan Kota Ambon yang ditetapkan masuk ke dalam Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia juga menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Melalui Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia, Kota Ambon telah memiliki *Master Plan* pengembangan *Ambon Smart City*, dengan menetapkan berbagai program unggulan pada masing-masing dimensi *smart city*. Dimensi *smart city* Kota Ambon meliputi : *smart governance*, *smart economy*, *smart branding*, *smart environment*, *smart society* dan *smart living*.

Dalam mendukung pelaksanaan *smart city* Pemerintah Kota Ambon membangun *command center*. Pembangunan *Command Center* merupakan salah satu implementasi program unggulan pada dimensi *smart governance*. Dimana pada fasilitas *command center* terdapat layanan integrasi aplikasi dan layanan 37 Unit CCTV untuk memantau arus lalu lintas, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), ketinggian permukaan air sungai pada lokasi 4 sungai besar yang melintas di Kota Ambon serta lokasi area public dan di tahun 2023 tambahan 5 unit cctv untuk memantau keadaan Pasar Mardika. Selain itu, telah dilakukan pemantauan secara terpusat seluruh aplikasi pelayanan public maupun internal pemerintahan. Aplikasi yang diintegrasikan pada *command center* antara lain : Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan (SIMAK), Aplikasi Monitoring Pajak Daerah, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIMANTAP), Layanan Lapor SP4N, ambon.go.id, Omni Channel, wifi id, BMKG ITEWS, Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIMDATIK).

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon juga menyediakan layanan *wifi station* di area publik sebanyak 17 titik di wilayah Kota Ambon. Dengan penyediaan layanan *wifi station* diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses internet di area publik sekaligus mempercepat transformasi digital di Kota Ambon.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon ke depan, yaitu penentuan

skala prioritas yang lebih mendalam terkait banyaknya refocusing anggaran atas keadaan keuangan Pemerintah Kota yang disclaimer.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kondisi Umum Perangkat Daerah.....	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2.3 Permasalahan Pembangunan.....	3
1.2.4 Isu – Isu Strategis.....	3
1.2.5 Susunan Organisasi	5
1.2.6 Keadaan Pegawai	6
1.2.7 Sarana dan Prasarana	7
1.2.8 Keuangan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Visi dan Misi.....	11
2.2.1 Visi	11
2.2.2 Misi.....	11
2.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2023	19
2.5.1 Target Belanja Perangkat Daerah	19
2.5.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	21
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25
3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	25

3.2.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya.....	37
3.2.3	Evaluasi dan Analisis Capaian Program	41
3.2.4	Evaluasi dan Analisis Rencana Aksi	49
3.3	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	53
3.4	Akuntabilitas Keuangan	55
3.4.1	Realisasi Anggaran	55
3.4.2	Analisis Efisiensi.....	56
3.5	Inovasi	57

BAB IV PENUTUP	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Pernyataan Telah Direviu
Checklist Reviu
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rencana Aksi 2023
Cascading 2023
Pohon Kinerja 2023
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rencana Aksi
Phon Konerja, Cascading
Laporan Hasil Evaluasi 2022
Penghargaan 2023
Dokumenttasi Kegiatan
SK Tim Penyusun Lakip

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Perkantoran	7
Tabel 2.1	Tujuan , Sasaran dan Strategi	10
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja 2023.....	10
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 2.4	Target Belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Perjanjian.....	12
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja 2023	10
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	22
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	24
Tabel 3.4	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25
Tabel 3.5	Formulasi Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023	38
Tabel 3.6	Evaluasi dan Analisis Capaian Program Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2023	41
Tabel 3.7	Evaluasi dan Analisis Rencana Aksi Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Tahun 2023	49
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023	55
Tabel 3.9	Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 5

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2023 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; urusan pemerintahan bidang statistik; dan urusan pemerintahan bidang persandian di Kota Ambon berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RBRI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.
2. Mendorong Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Kondisi Umum Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

1.2.1 Kedudukan

- a. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Komunikasi Informatika dan Persandian.
- b. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika dan persandian.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Permasalahan Pembangunan

Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam pergaulan antar negara di zaman globalisasi. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia. Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Ambon secara umum adalah pembangunan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh fasilitas umum Kota Ambon guna mendukung *smart city*, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public, (*e-goverment, e-city, e-planning, e-budgeting, dll*) belum dikembangkan guna mendukung Ambon Smart City.

Urusan statistik

Salah satu hal urgen dalam pembangunan adalah tersediaan data dan informasi yang akurat untuk kebutuhan perencanaan kota. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Ambon dalam urusan data statistik antara lain adalah kuantitas akurasi data sektoral dari SKPD yang masih kurang konsisten, dan masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan, serta masih belum optimalnya sistem informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan kota.

1.2.4 Isu-Isu Strategis

Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Keterbukaan Informasi Publik
- b. Jaringan Intra Pemerintah
- c. Pusat Data
- d. Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- e. Aplikasi Umum SPBE

Urusan Statistik

- a. Statistik Sektoral
- b. Satu Data Indonesia

Urusan Persandian

- a. Layanan Keamanan Informasi
- b. Jaring Komunikasi Sandi

1.2.5 Susunan Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



1.2.6 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon terhitung per Desember 2022 didukung oleh pegawai sebanyak 44 orang pegawai, yang terdiri dari 23 orang ASN dan 21 orang Non ASN. Secara lengkap, komposisi pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	25
2	Perempuan	29
Jumlah		44

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IVc	1
2	IVb	0
3	IVa	4
4	III d	7
5	III c	3
6	III b	1
7	III a	3
8	II d	3
9	II c	-
10	II b	1
11	II a	-
12	Non ASN	21
Jumlah		44

Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	24
3	D-III	8
4	SMA	5
Jumlah		44

1.2.7 Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Nama Barang	Jumlah
1	Sepeda Motor	3
2	Mobil	3
3	Felling Cabinet	14
4	AC	17
5	Rak Server	4
6	Brankas	1
7	Pesawat Telepon	1
8	Display	5
9	Komputer	39
10	Laptop	13
11	Scanner	3
12	Printer	11
13	Meja Kerja	55
14	Kursi Kerja	65
15	Kursi Kayu	6
16	Kursi Tamu	10
17	Lemari Arsip	2
18	CCTV	34
19	Hardisk	6
20	Box Informasi	7
21	Drone	1
22	Stabilisator Osmo	1
23	Handy Talky	4

No	Nama Barang	Jumlah
24	Tangga Besi	1
25	Memory Sandisk	4
26	Camera Elektronik	1
27	Pulse Generator	1
28	Lensa Kamera	2
29	Tripod	5
30	Pulse Distributor	1
31	Baterai Charger	2
32	Headphone	1
33	Handphone	2
34	Camera Elektronik	6
35	Video Mixer	1
36	Sound System	2
37	Recorder	2
38	Display Indor	1
39	CCTV Indoor	4
40	Wall TV + Breket	15
41	NVR	1
42	Senor Pintu 1	2
43	Switch	20
44	Acess Point	20
45	Container Box	10
46	Router	20
47	Router	20
48	Titik Wifi	15
49	Desa/ Kelurahan	20
50	Sofa	1
51	Hard disk External 2 TB	2
52	Card Reader	2
53	Kabel Jack 5m	1
54	Memory Ram	1
55	Router Switch	1
56	Capture Card	1
57	SD Card	1
58	Kabel SDI 30M	5
59	Tas Kamera	2
60	Container Box 150L	2
61	Canon batery 800D	2
62	Canon Batery 1300D	1
63	Sony NXCam 200TB	1
64	Camera DSLR Canon 6D	1

No	Nama Barang	Jumlah
65	Lensa Sony (18-200)	1
66	Wireless Video	1
67	Handy Talky	5
68	Monopod	1
69	Gimbal Smartphone	1
70	Extreme 20x SDI dan HDMI Live Streaming Kamera	1
71	Note Book HP	3
72	PC Unit Lenovo	3
73	Printer Epson	5
74	Kursi Kerja Pegawai	2
75	Kursi Kerja Pimpinan Pejabat Eselon II	1
76	Meja Biro	2
77	Kursi Rapat Ruang Data	18
78	Meja Rapat	2
79	CCTV	5
80	Harddisk	2
81	Breket CCTV	5
82	Video card procesor	3
83	TV 42inc	2
84	NVR 32 CH	2
85	Rak Server	1
86	Accesoris CCTV	5
87	Accesoris Kabel	5
88	Terminal CCTV	5
89	Kabel listrik dan aoutdoor	6
90	Terminal FO	5
91	Kabel FO	5
92	Box Listrik	5

1.2.8 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Ambon. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023, jumlah anggaran yang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. **10.776.709.677,00** Kemudian melalui penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian Kota Ambon bertambah anggaran untuk APBD perubahan sebesar Rp. **2.516.640.367,00** sehingga menjadi **Rp.13.293.350.044,00** dengan **alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.442.095.085,00** dan **Belanja Langsung sebesar Rp. 10.851.254.959,00.**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon merupakan manifestasi komitmen Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Ambon yang tertuang dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026.

RPD Pemerintah Kota Ambon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi Kota Ambon, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi Kota Ambon yang tertuang dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 yaitu :

“Terwujudnya Tata Kehidupan Manusia Ambon Yang Manis, Demokratis, dan Mandiri, Secara Berkelanjutan”

2.2.2 Misi

Misi yang dirumuskan untuk pembangunan Kota Ambon selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- Misi 1** : Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan
- Misi 2** : Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan

Misi 3 : Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri secara berkelanjutan.

2.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintah	Pengelolaan Informasi dan komunikasi public yang efektif dan efisien
		Pengelolaan dan pemanfaatan jaringan dan teknologi informasi
	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi pemerintah daerah, diukur melalui Indekas KAMI oleh BSSN
	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu daerah	Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan satu data daerah di seluruh OPD

2.3.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023-2026 :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon**

No	Indikator	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
			2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pembentukan KIM ditingkat desa/klurahan	%	10%	20%	30%	40%	$\frac{\text{Jumlah KIM yang dibentuk}}{\text{Jumlah desa/kecamatan/negeri}} \times 100$
2	Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	%	62.5%	66.66%	70%	72.7%	$\frac{\text{Jumlah media kerjasama}}{\text{Jumlah media di Kota Ambon}} \times 100$
3	Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	%	30%	45%	60%	75%	$\frac{\text{Jumlah media sosial}}{\text{jumlah OPD}} \times 100$

No	Indikator	Satuan	Target				Rumus Perhitungan
			2023	2024	2025	2026	
4	Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	%	52.27%	52.27%	65%	80%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra melalui diskominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
5	Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	%	40%	60%	70%	80%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki website – aplikasi}}{\text{jumlah perangkat daerah}} \times 100$
6	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	%	30%	45%	60%	75%	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik di Pemkot Ambon yang telah menggu}}{\text{Jumlah sistem elektronik di Pemkot Am}}$
7	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	30%	45%	60%	75%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki data pada portal satu data daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$

Sedangkan berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound).

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound)**

IKU	SMART				
	Specific/Khusus	Measurable/Terukur	Achievable/Mampu dicapai	Relevant/Kesesuaian dengan tupoksi	Time-bound/Waktu
Persentase pembentukan KIM ditingkat desa/klurahan	KIM yang di Tingkat kelurahan/desa/negeri	Diukur dari jumlah KIM yang sudah dibentuk di kelurahan/desa/negeri	Adanya dukungan anggaran dari APBD	Kesesuaian dengan tupoksi OPD yaitu membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan dibidang komunikasi dan komunikasi informatika dan persandian	4 tahun
Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	Media massa yang bekerja sama dengan pemerintah kota ambon	Diukur dari jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemerintah kota ambon	Adanya dukungan anggaran dari APBD	Kesesuaian dengan tupoksi OPD yaitu membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan dibidang komunikasi dan komunikasi informatika dan persandian	4 tahun
Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	Media social yang dimiliki OPD pemerintah kota ambon	Diukur dari jumlah OPD yang memiliki media sosial	Adanya kesadaran dari OPD tentang pemanfaatan media social untuk publikasi kegiatan OPD tersebut	Kesesuaian dengan tupoksi OPD yaitu membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan dibidang komunikasi dan komunikasi informatika dan persandian	4 tahun

IKU	SMART				Time-bound/Waktu
	Specific/Khusus	Measurable/Terukur	Achievable/Mampu dicapai	Relevant/Kesesuaian dengan tupoksi	
Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	Perangkat Daerah dilingkungan pemkot yang terhubung jaringan internet melalui diskominfo	Diukur dari jumlah perangkat daerah yang terhubung jaringan intra melalui diskominfo	Adanya dukungan anggaran dari APBD	Kesesuaian dengan tupoksi OPD yaitu membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan dibidang komunikasi dan komunikasi informatika dan persandian	4 tahun
Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	OPD dilingkungan Pemkot yang memiliki website	Diukur dari jumlah OPD yang memiliki website dibagi dengan jumlah OPD	Adanya peraturan presiden tentang SPBE untuk pemanfaatan penggunaan aplikasi dan website masing-masing OPD	Kesesuaian dengan tupoksi OPD yaitu membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan dibidang komunikasi dan komunikasi informatika dan persandian	4 Tahun
Persentase penyediaan sertifikat elektronik	Sertifikat elektronik yang telah digunakan pada layanan elektronik	Diukur dari jumlah layanan elektronik yang sudah menggunakan sertifikat elektronik	Adanya dukungan anggaran dari APBD dan peraturan walikota terkait penggunaan system elektronik	Kesesuaian dengan tupoksi OPD yaitu membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan dibidang komunikasi dan komunikasi informatika dan persandian	4 tahun
Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	Data opd yang tersedia pada portal satu data daerah	Diukur dari jumlah OPD yang sudah memasukkan data pada portal satu data daerah	Adanya dukungan anggaran dari APBD dan adanya peraturan walikota untuk pemanfaatan satu data daerah	Kesesuaian dengan tupoksi OPD yaitu membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan dibidang komunikasi dan komunikasi informatika dan persandian	4 tahun

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan dan Menerapkan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Ambon Sesuai Asas-Asas Keterbukaan	Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	10%
		Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	62.5%
		Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	30%
		Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	52.27%
		Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	40%
2.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	30%
3.	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	30%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.960.137.761,-	APBD
2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.760.563.875,-	APBD
3. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.887.275.581,-	APBD
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 50.455.935,-	APBD
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Persandian	Rp. 118.276.525,-	APBD

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Namun dalam perubahan Perubahan Perjanjian Kinerja ini tidak merubah sasaran strategis, indikator kinerja maupun target kinerjanya, perubahan perjanjian kinerja diubah pada besarnya jumlah anggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan yang dilakukan. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan dan Menerapkan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Ambon Sesuai Asas-Asas Keterbukaan	Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	10%
		Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	62.5%
		Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	30%
		Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	52.27%
		Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	40%
2.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	30%
3.	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	30%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.325.715.898,-	APBDP
2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.062.092.375,-	APBDP
3. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.736.809.311,-	APBDP
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 50.455.935,-	APBDP
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Persandian	Rp. 118.276.525,-	APBDP

2.5 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 10.776.709.677,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 2.763.548.082,- dan Belanja Langsung Rp. 8,013,161,595,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp.13.293.350.044,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.450.255.085,- dan Belanja Langsung Rp 10,843,094,959,-.

2.5.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Target Belanja Tidak Langsung mendapat proporsi 45.26 % sedangkan Belanja Langsung 54.74 % dari total anggaran yang tersedia. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.763.548.082,-	25.64%
Belanja Langsung	Rp. 8,013,161,595,-	74.36%
Jumlah	Rp. 10.776.709.677,-	100

2.5.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategi

Tabel. 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran	Persentase	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan dan Menerapkan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Ambon Sesuai Asas-Asas Keterbukaan	Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	Rp. 163.886.498,-	0	1 sub kegiatan
		Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	Rp. 2.836.183.064,-	100	1 sub Kegiatan
		Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	Rp. 996.677.377	100	2 sub kegiatan
		Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	Rp. 2.858.150.208	100	1 sub kegiatan
		Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	Rp. 1.029.125.373	100	6 sub kegiatan
2	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	Rp. 50.455.935	100	1 sub kegiatan
3	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	Rp. 118.276.525	100	1 sub kegiatan
Jumlah			Rp. 2.836.183.064,-	85.71	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikangambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau tua
$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau muda
$66 \leq 75$	Sedang	Kuning tua
$51 \leq 65$	Rendah	Kuning muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon serta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	10%	0%	0%
		Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	62.5%	71.82%	114.91%
		Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	30%	65.90%	219.67%
		Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	52.27%	100%	191.31%
		Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	40%	65.91%	164.78%
2	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	30%	19.51%	65.03%
3	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	30%	86.36%	287.87%

Berdasarkan tabel di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki 3 sasaran strategis yaitu Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah, Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah.

Target Indikator Persentase pembentuka KIM ditingkat desa/kelurahan adalah sebesar 10 % dan capaian kinerja sebesar 0 %. Target indikator persentase media massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah adalah sebesar 62.5 % dan capaian kinerja sebesar 114.82 %. Target indikator persentase pemanfaatan media social oleh OPD sebesar 30 % dan capaian kinerja sebesar 219.67 %. Target indikator persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah adalah sebesar 52.27 % dan capaian kinerja sebesar 191.31 %, sedangkan target indikator persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah adalah 40% dan capaian kinerja sebesar 164.78 %. Dan untuk sasaran ke dua indikator persentase penyediaan sertifikat elektronik dengan target 30% dan capaian kinerja sebesar 65.03 %. Sedangkan untuk target indikator persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah adalah 30% dan capaian kinerja sebesar 287.87 %.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon

No	Nama Indikator	Target	Rumus Pengukuran	Perhitungan Tahun	Capaian Tahun 2023
1	Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	10%	$\frac{\text{Jumlah KIM yang dibentuk}}{\text{Jumlah desa/kelurahan/negeri}} \times 100$	$\frac{0}{50} \times 100$	0%
2	Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	62.5%	$\frac{\text{Jumlah media kerjasama}}{\text{Jumlah media di Kota Ambon}} \times 100$	$\frac{78}{110} \times 100$	71.82%
3	Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	30%	$\frac{\text{Jumlah media sosial}}{\text{jumlah OPD}} \times 100$	$\frac{29}{44} \times 100$	65.90%
4	Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	52.27 %	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan jaringan internet dari kominfo}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$	$\frac{64}{64} \times 100$	100%
5	Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	40%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki website – aplikasi}}{\text{jumlah perngkat daerah}} \times 100$	$\frac{29}{44} \times 100$	65.91%
6	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	30%	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik di Pemkot Ambon yang telah menggunakan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah sistem elektronik di Pemkot Ambon}}$	$\frac{9}{41} \times 100$	19.51%
7	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	30%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki data pada portal satu data daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	$\frac{38}{44} \times 100$	86.36%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci pada sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.4 analisis pencapaian strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal pada RPD	2023		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD Tahun 2026
			Target	Realisasi	
1	Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	0%	10%	0%	40%
2	Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	53.33%	62.5%	71.82%	72.7%
3	Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	10%	30%	65.90%	75%
4	Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	52.27%	52.27%	100%	80%
5	Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	20%	40%	65.91%	80%
6	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	0%	30%	19.51%	75%
7	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	0%	30%	86.36%	75%

3.2.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Indikator : Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan

Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yaitu “Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan” capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi tahun

2023 terhadap target tahun 2023 disajikan dalam table berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City	Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	10%	0	0

Formula penghitungan Indikator Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan/negeri adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kim yang dibentuk}}{\text{Jumlah desa/kelurahan/negeri}} \times 100 = \frac{0}{50} \times 100 = 0\%$$

Pada tahun 2023 untuk indikator Persentase pembentukan KIM realisasi dan capaian kinerjanya 0%. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran kegiatan dari triwulan II ke akhir triwulan IV, namun pada saat akan dilakukan kegiatan tersebut anggaran diprioritaskan untuk kegiatan yang lebih urgent dalam hal ini kegiatan yang melakukan pembayaran rutin sehingga kegiatan tersebut tidak teralisasi.

2. Indikator : Persentase media massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah

Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yaitu “Persentase media massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah” capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023 disajikan dalam table berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City	Persentase media massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	62.5%	71.82 %	114.91%

Formula penghitungan Indikator Persentase Persentase media massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah ditingkat desa/kelurahan/negeri adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah media kerjasama}}{\text{Jumlah media di Kota Ambon}} \times 100 = \frac{79}{110} \times 100 = 71.82 \%$$

Realisasi pada indikator ini sebesar 71.82% Dimana target sebesar 62.5%, sehingga Tingkat capaiannya adalah 113.46 %. Perhitungan capaian target indikator ini diperoleh dari dukungan dari Pemerintah Kota Ambon itu sendiri, yaitu dari segi ketersediaan anggaran yg di berikan dari Pemerintah Kota untuk kegiatan ini. Dan juga Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon memberikan peluang bagi media-media lokal untuk berkontribusi dalam mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Ambon. Dengan semakin banyak media yang terlibat Kerjasama maka semakin bertambah Masyarakat yang menggeluti profesi wartawan yang kemudian secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan bagi Masyarakat.

Sampai dengan tahun 2023 Media Masa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon adalah 79 Media,

yakni:

- a. Media Cetak
 - 1) Tempo Media Group
 - 2) PT.Ambon Press Intermedia
 - 3) PT. Kabar Intermedia Timur

- 4) PT. Radar Ambon
- 5) PT. Ambon Manise Intermedia
- 6) Pt. Siwalima Media Harian
- 7) PT. Media Maluku Abadi
- 8) PT. Maluku Pratama
- 9) Abdi Webminar Series
- 10) PT. Delta Indah Abadi

b. Media Elektronik

- 1) Televisi Republik Indonesia (TVRI)
- 2) PT. Carang Televisi Indonesia
- 3) LPP RRI Ambon
- 4) Pt. Ambon Ekspres Radio

c. Media Online

- 1) PT Besorah Ambon Media
- 2) PT. Medira Media Sejahtera
- 3) PT. Berkat Cemara Indah
- 4) Perum LKBN Antara
- 5) PT. Mimbar Inti Media
- 6) PT. Nusa Ina Maluku
- 7) PT. Kreasi Selaras Sejahtera
- 8) PT. Tribun Network
- 9) PT. Zona Info Maluku
- 10) PT. Deo Media Pratama
- 11) PT. Media Bedah Nusantara
- 12) PT. Satu Optima Mandiri
- 13) PT. Rasma Bahagia Utama Abadi
- 14) PT. Media Nasional Grup
- 15) PT. Alhafi Digital Media
- 16) PT. Tiara Meia Sejahtera
- 17) PT. Suara Hati Maluku
- 18) PT. Jaya Media Group Indo
- 19) PT. Ina Ravel Grup
- 20) PT. Media Citra News Utama

- 21) PT. Maluku Tercinta Press
- 22) PT. Vosin Arika Media
- 23) PT. Sumber Baru Maluku
- 24) PT. Aksa Media Grup
- 25) PT. Fajar Bersinergi Wiraksara
- 26) PT. Dhara Pos Nusantara
- 27) PT. DeaDio Perkasa Abadi Mandiri
- 28) PT. Joel Adrian Sejahtera
- 29) PT. Cahaya Mentari Papparisa
- 30) PT. Mantiket Siber Indonesia
- 31) PT. Pusaka Maluku Media
- 32) PT. Blessy Brilliant Media Pratama
- 33) PT. Manggurebe Press Bersama
- 34) PT. Sinar Maluku Ekspres
- 35) PT. Maluku Post Lintas Nusa
- 36) PT. Grace Multimedia Jaya
- 37) PT. Tribun Lintas Media
- 38) PT. Acta Diurna Sakti Abadi
- 39) PT. Elizabeth Sakti Abadi
- 40) PT. N25 Siber Media
- 41) PT. Sinar Informasi Aktual
- 42) PT. Dinamika Maluku Media
- 43) PT Samoedro Investama Indonesia
- 44) PT. Maluku Media Indonesia
- 45) PT. Renjino Warta Utama
- 46) PT. Koreri Trans Media
- 47) PT. Cahaya Lensa Timur
- 48) PT. Radar Maluku News
- 49) PT. Maluku Media Perkasa
- 50) PT. Atma Negara Jaya
- 51) PT. Lien Bipolo Grup
- 52) PT. Pilar Timur Evavpres
- 53) PT. Pancar Abadi Indah
- 54) PT. Arseman Mapeta Jaya

- 55) PT. Marinyo Media Sejahtera
- 56) PT. Qirani Saburo Promedia
- 57) PT. Mantra Pratama Sejahtera
- 58) PT. Tabaos
- 59) PT. Shadanra Jaya Abadi
- 60) PT. Suara Papparisa Media
- 61) PT. Referensi Pudoxpenna Nusantara
- 62) PT. Shalom Intramedia Nusantara
- 63) PT. News Media Nusantara
- 64) PT. Putra Maluku Intramedia
- 65) PT. Ambon Ekspres Radio

3. Indikator : Persentase pemanfaatan media social oleh OPD

Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yaitu “Persentase pemanfaatan media social oleh OPD” capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023 disajikan dalam table berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City	Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	62.5%	65.90%	219.67%

Formula penghitungan Indikator Persentase Pemanfaatan Media Sosial adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki media sosial}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 = \frac{29}{44} \times 100 = 65.90\%$$

Berdasarkan table di atas realisasi sebesar 65.90% dan capaian kinerja 2023 sebesar 219.67%. Dari realisasi tersebut menandakan bahwa sudah banyak

OPD yang telah menggunakan social media untuk mempublikasikan kegiatan pada Dinas tersebut.

4. Indikator : Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah

Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yaitu “Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah” capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City	Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	52.27%	100%	191.31%

Formula penghitungan Indikator Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan jaringan internet dari kominfo}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$$

$$= \frac{64}{64} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan table diatas realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 191.31%. Sejauh ini dari 64 perangkat daerah di kota Ambon telah terkoneksi jaringan internet memlalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.

5. Indikator : Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah

Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yaitu “Persentase integrasi aplikasi layanan public dan

layanan aparatur pemerintah” capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City	Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan apartur pemerintah	40%	65.91%	164.78%

Formula penghitungan Indikator Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki website dan aplikasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 = \frac{29}{44} \times 100 = 65.91\%$$

Berdasarkan tabel di atas realisasi sebesar 65.91% dan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 164.78% hal ini disebabkan karena sampai dengan tahun 2023 OPD yang memiliki website-aplikasi berjumlah 29 OPD dari 44 OPD. Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memfasilitasi penyediaan pembuatan website bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun 29 OPD yang memiliki website-aplikasi, yaitu:

- 1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian - diskominfo.ambon.go.id; simdatik.ambon.go.id; LAPOR SP4N; e-surat/Sms Pengaduan; ikm.ambon.go.id; eruang.ambon.go.id; Omnichanel.
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa dpppamd.ambon.go.id
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu – ptsp.ambon.go.id; Simantap
- 4) Dinas Pendidikan – dindik.ambon.go.id; dapodik
- 5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan – dpkp.ambon.go.id

- 6) Dinas Sosial – SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial);
dinsos.ambon.go.id
- 7) Dinas Tenaga Kerja – Register Biometrik CTKI; sipnaker.ambon.go.id
- 8) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan – dlhp.ambon.go.id
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – ambon.dukcapil.online;
disdukcapil.ambon.go.id; SIAK; SIMAK
- 10) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan – visit.ambon.go.id; Pariwisata Ambon
Music Office (AMO)
- 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan – iAmbonManise; KunangKunang;
Inliste
- 12) Dinas Kesehatan – dinkes.ambon.go.id; SIKDA GENERIK
- 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan – disperindag.ambon.go.id
- 14) Satuan Polisi Pamong Praja – satpolpp.ambon.go.id; SIMPAPEDA
- 15) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah – bpkad.ambon.go.id;
SIMDA
- 16) Badan Penanggulangan Bencana – bpbd.ambon.go.id
- 17) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
– e-planev; SIPD
- 18) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah – tapping.ambon.go.id;
bpprd.ambon.go.id; SIMPATDA; SSMIOP PBB; e-SPTPD; E-Layanan; E-
Potensi
- 19) Bagian Hukum – jdih.ambon.go.id
- 20) Bagian Organisasi dan Tata Laksana – Sempe KASN; SIM Anjab-ABK; E-
Sakip
- 21) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa – SIRUP; SPSE
- 22) Kecamatan Sirimau – kecamatansirimau.ambon.go.id
- 23) Kecamatan Nusaniwe – kecamatannusaniwe.ambon.go.id
- 24) Kecamatan Leitimur Selatan – leitimurselatan.ambon.go.id
- 25) Kecamatan Teluk Ambon Baguala – kecamatanbaguala.ambon.go.id
- 26) Kecamatan Teluk Ambon – kecamatantelukambon.ambon.go.id
- 27) Kelurahan – simak.ambon.go.id
- 28) Puskesmas Karang Panjang – pkmkarangpanjang.ambon.go.id
- 29) Puskesmas Poka – pkmpoka.ambon.go.id

6. Indikator : Persentase penyediaan sertifikat elektronik

Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yaitu “Penyediaan sertifikat elektronik” capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	30%	19.51%	65.03%

Formula penghitungan Indikator Persentase penyediaan sertifikat elektronik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik di Pemkot Ambon yang telah menggunakan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah sistem elektronik di Pemkot Ambon}} \times 100$$

$$= \frac{8}{41} \times 100 = 19.51\%$$

Berikut daftar sistem elektronik yang sudah menggunakan sertifikat elektronik :

1. Website Pemerintah Kota Ambon www.ambon.go.id
2. Website Diskominfo www.diskominfo.ambon.go.id
3. SIMDATIK www.simdatik.ambon.go.id
4. SIMAK www.simak.ambon.go.id
5. AMBON ACCES
6. DPTMPTSP www.dptmptsp.ambon.go.id
7. Simantapds www.simantapds.ambon.go.id

8. Simantap Online www.simantaponline.ambon.go.id

7. Indikator : Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah

Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yaitu “Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah” capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	30%	86.36%	287.87%

Formula penghitungan Indikator Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki data pada portal satu data daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$$

$$= \frac{38}{44} \times 100 = 86.36\%$$

Sebanyak 38 OPD yang sudah mengumpulkan data saat melakukan penyusunan buku statistic sectoral. Data dari buku tersebut yang kemudian diupload di portal satu data daerah.

Berikut daftar OPD yang telah memiliki data pada portal satu data daerah antara lain :

1. Sekretariat DPRD
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7. Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa
9. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Pendidikan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Perikanan
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon
17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
18. Dinas Sosial
19. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22. Satuan Polisi Pamong Praja
23. Bdan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pembangunan Daerah dan Litbang
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
27. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Bagian Hukum
31. Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
32. Bagian Kesejahteraan Rakyat
33. Bagian Organisasi Tata laksana dan Umum
34. Bagian Tata Pemerintahan
35. Bagian Umum dan Perlengkapan
36. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
37. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya

38. Bagian Adminisrasi Pembangunan

3.2.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Kinerja pembangunan daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Berikut table perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.5
Formulasi Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berorientasi dan memiliki kompetensi yang tinggi	Keterbukaan Informasi Publik (2022)		90%	61.365	68.18	-	-	-
	Tersedianya Layanan Teknologi Manajemen Informasi (2022)		90%	80.91%	89.88	-	-	-
Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi menuju ambon Smart City	Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan (2023)	$\frac{\text{Jumlah KIM yang dibentuk}}{\text{Jumlah desa/kelurahan/negeri}} \times 100$	-	-	-	10%	0%	0
	Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah (2023)	$\frac{\text{Jumlah media kerjasama}}{\text{Jumlah media di Kota Ambon}} \times 100$	--	-	-	62.5%	71.82%	113.46%
	Persentase pemanfaatan media social oleh OPD (2023)	$\frac{\text{Jumlah media sosial}}{\text{jumlah OPD}} \times 100$	--	-	-	30%	65.90%	219.67%
	Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah (2023)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan jaringan internet dari kominfo}}{\text{jumlah perangkat daerah}} \times 100$	--	-	-	52.27%	100%	191.31%
	Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah (2023)	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki website – aplikasi}}{\text{jumlah perngkat daerah}} \times 100$	--	-	-	40%	65.91%	164.78%

Tujuan	Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penyediaan sertifikat elektronik (2023)	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik di Pemkot Ambon yang telah menggunakan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah sistem elektronik di Pemkot Ambon}}$	--	-	-	30%	19.51%	65.03%
	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah (2023)	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki data pada portal satu data daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	--	-	-	30%	86.36%	287.87%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022 dan 2023. Beberapa Indikator Kinerja Tahun 2023 mengalami perubahan berdasarkan RPD 2023-2026 dan Renstra Dinas tahun 2023-2026. Indikator kinerja 2023 ada yang mengalami perubahan indicator maupun formula perhitungan capaian indicator, maupun target. Sementara di tahun 2022 capaian kinerja, formula perhitungan maupun target masih menggunakan data perhitungan pada Renstra tahun 2017-2022, sehingga pada table ini tidak dapat dibandingkan untuk target, realisasi maupun capaian kinerjanya.

3.2.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Program

**Tabel 3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Program
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Tahun 2023**

Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI KINERJA					KENDA LA	SOL USI	WAKTU PELAKSANA AN
		PAGU SEBELUM (RP)	PAGU SETELAH (RP)	HASIL	VOLUME	PENYERAPAN DANA	DAN A (%)	FISIK	FIS IK (%)	HASIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 3,960,137,761	Rp 4,325,715,898			Rp 4,187,240,462	96.80 %						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 11,210,718	Rp 11,210,718			Rp 10,960,718	97.77 %						
1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ambon, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Rp 11,210,718	Rp 11,210,718	Tersedianya dokumen LAKIP, LKPJ,LPPD,RENJ A,RKA SKPD	4 Dokumen	Rp 10,960,718	97.77 %	4 Doku men	100 %	Terbayarnya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.960.718,-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 2,767,824,855	Rp 2,450,451,858			Rp 2,450,451,858	100.0 0%						

Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI KINERJA					KENDA LA	SOL USI	WAKTU PELAKSANA AN
		PAGU SEBELUM (RP)	PAGU SETELAH (RP)	HASIL	VOLUME	PENYERAPAN DANA	DAN A (%)	FISIK	FISIK (%)	HASIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon)	Kota Ambon	Rp 2,759,468,082	Rp 2,442,095,085	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai dengan anggaran sebesar Rp 2.759.468.082	12 bulan	Rp 2,442,095,085	100.0 0%	12 Bulan	100 %	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.442.095.085,-			
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Ambon	Rp 8,356,773	Rp 8,356,773	Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD	2 Dokumen	Rp 8,356,773	100.0 0%	2 dokumen	100 %	Tersedianya 2 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.356.773,-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 549,083,776	Rp 745,947,826			Rp 701,422,673	94.03 %						
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon	Rp 272,434,262	Rp 469,298,312	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	Rp 467,244,000	99.56 %	8 jenis	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dengan realisasi sebesar Rp. 467.244.000,-			
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Rp 35,325,764	Rp 35,325,764	Tersedianya ATK kantor dan benda pos (meterai)	35 Jenis	Rp 35,173,169	99.57 %	35 Jenis	100 %	Tersedianya 35 jenis ATK kantor dengan realisasi sebesar Rp. 35.173.169,-			

Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI KINERJA					KENDA LA	SOL USI	WAKTU PELAKSANAAN
		PAGU SEBELUM (RP)	PAGU SETELAH (RP)	HASIL	VOLUME	PENYERAPAN DANA	DAN A (%)	FISIK	FISIK (%)	HASIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	Rp 17,999,750	Rp 17,999,750	Tersedianya bahan cetak penggandaan dan penjilidan	37 57 1 le m ba r 50 jili d	Rp 15,930,609	88.50 %	375 71 lemb ar 50 jilid	100 %	Tersedianya cetak penggandaan dan jilid laporan dengan realisasi sebesar Rp. 15.930.609,-			
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon	Rp 223,324,000	Rp 223,324,000	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Kali	Rp 183,074,895	81.98 %	8 kali	100 %	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 183.074.895,-			
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah		Rp 484,266,372	Rp 970,353,456			Rp 906,474,511	93.42 %						
1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	Rp 45,978,000	Rp 123,678,000	Tersedianya telepon berlangganan	1 Paket	Rp 108,850,026	88.01 %	1 paket	100 %	Tersedianya telepon berlangganan dengan realisasi sebesar Rp. 108.850.026,-			
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Rp 438,288,372	Rp 846,675,456	Terbayarnya gaji kontrak dan honorarium pengadaan barang jasa	12 bulan	Rp 797,624,485	94.21 %	12 bulan	100 %	Terbayarnya gaji kontrak dan honorarium pengadaan barang jasa dengan realisasi sebesar Rp. 797.624.485,-			

Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI KINERJA					KENDA LA	SOL USI	WAKTU PELAKSANA AN
		PAGU SEBELUM (RP)	PAGU SETELAH (RP)	HASIL	VOLUME	PENYERAPAN DANA	DAN A (%)	FISIK	FIS IK (%)	HASIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 147,752,040	Rp 147,752,040			Rp 117,930,702	79.82 %						
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kota Ambon	Rp 132,832,040	Rp 132,832,040	Tersedianya pemeliharaan dan pajak mobil dinas	3 Unit	Rp 107,970,702	81.28 %	3 unit	100 %	Tersedianya pemeliharaan dan pajak mobil dinas dengan realisasi sebesar Rp. 107.970.702.-			
2) Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana Prasarana Pensukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Rp 14,920,000	Rp 14,920,000	Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	2 jenis	Rp 9,960,000	66.76 %	2 jenis	100 %	Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor dengan realisasi sebesar Rp.9.960.000, -			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Rp 2,760,563,875	Rp 5,062,092,375			Rp 4,404,766,294	87.01 %						
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 2,760,563,875	Rp 5,062,092,375			Rp 4,404,766,294	87.01 %						
1) Pelayanan Informasi Publik	Kota Ambon	Rp 741,677,377	Rp 1,498,577,377	Terlaksananya publikasi kegiatan pemerintah kota ambon	1 paket	Rp 1,116,237,794	74.49 %	1 paket	100 %	Publikasi kegiatan pemerintah Kota Ambon terrealisasi sebesar Rp. 1.116.237.794 ,-			

Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI KINERJA					KENDA LA	SOL USI	WAKTU PELAKSANAAN
		PAGU SEBELUM (RP)	PAGU SETELAH (RP)	HASIL	VOLUME	PENYERAPAN DANA	DAN A (%)	FISIK	FIS IK (%)	HASIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2) Layanan Hubungan Media	Kota Ambon	Rp 1,600,000,000	Rp 3,107,128,500	Terlaksananya layanan kehumasan	1 paket	Rp 3,057,028,500	98.39 %	1 paket	100 %	Kerjasama pemerintah kota ambon dengan media cetak, elektronik dan online terealisasi sebesar Rp. 3.057.028.500,-			
3) Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Kota Ambon	Rp 163,886,498	Rp 163,886,498	Tersedianya bimtek	1 paket	Rp -	0.00%	1 paket	0%	Bimtek KIM terealisasi sebesar Rp. 0			
4) Penyelenggaraan Hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Kota Ambon	Rp 255,000,000	Rp 292,500,000	Terlaksananya layanan kehumasan	3 kegiatan	Rp 231,500,000	79.15 %	3 kegiatan	100 %	Featur, liputan dan video profil pemerintah kota ambon dengan DPRD Kota Ambon terealisasi sebesar Rp. 231,500,000,-			
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Rp 3,887,275,581	Rp 3,736,809,311			Rp 3,401,527,767	91.03 %						
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Rp 2,878,374,408	Rp 3,033,966,138			Rp 2,890,601,103	95.27 %						
1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Rp 20,224,200	Rp 20,224,200	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan nama sub domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1 paket	Rp 18,120,000	89.60 %	1 paket	100 %	sewa hosting sewa domain terealisasi sebesar Rp. 18.120.000,-			

Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI KINERJA					KENDA LA	SOL USI	WAKTU PELAKSANA AN
		PAGU SEBELUM (RP)	PAGU SETELAH (RP)	HASIL	VOLUME	PENYERAPAN DANA	DAN A (%)	FISIK	FISIK (%)	HASIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Rp 2,858,150,208	Rp 3,013,741,938	Jumlah jaringan sistem intra pemerintah	1 paket	Rp 2,872,481,103	95.31 %	1 paket	100 %	internet astinet dan metro cctv terealisasi sebesar Rp. 2.872.481.103,-			
Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Rp 1,008,901,173	Rp 702,843,173			Rp 510,926,664	72.69 %						
1) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Rp 248,521,000	Rp 38,071,000	Terkelolanya pusat data pemerintah daerah	1 Paket	Rp 24,250,687	63.70 %	1 paket	100 %	Sewa cloud dan pemeliharaan server terealisasi sebesar Rp. 24.250.687,-			
2) Penyelenggaraan komunikasi sistem intra pemerintah daerah	Kota Ambon	Rp 295,844,200	Rp 200,236,200	Terlaksananya penyelenggara sistem intra pemerintah daerah	1 paket	Rp 147,012,767	73.42 %	1 paket	100 %	call center, omni chanel, mobile device terealisasi sebesar Rp.147.012.767,-			
3) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Ambon	Rp 37,588,376	Rp 37,588,376	Terlaksananya program evaluasi smart city	1 paket	Rp 37,588,376	100.0 0%	1 paket	100 %	evaluasi smart city terealisasi sebesar Rp. 37.588.376,-			

Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI KINERJA					KENDA LA	SOL USI	WAKTU PELAKSAN AAN
		PAGU SEBELUM (RP)	PAGU SETELAH (RP)	HASIL	VOLUME	PENYERAPAN DANA	DAN A (%)	FISIK	FIS IK (%)	HASIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Rp 407,150,997	Rp 407,150,997	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi dan informasi	1 paket	Rp 291,389,884	71.57 %	1 paket	100 %	Pemeliharaan cctv, videotron, rehabilitasi command center , jasa instalasi pengkabelan terealisasi sebesar Rp. 380.854.884,-			
5) Pengelolaan Government Chief Information Officer	Kota Ambon	Rp 19,796,600	Rp 19,796,600	Terlaksananya pengelolaan government chief officer	1 paket	Rp 10,684,950	53.97 %	1 paket	100 %	sms broadcast pengaduan terealisasi sebesar Rp. 10.684.950,-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Rp 50,455,935	Rp 50,455,935			Rp 50,439,500	99.97 %						
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota		Rp 50,455,935	Rp 50,455,935			Rp 50,439,500	99.97 %						
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengelolaan Analisis dan Diseminasi Data	Kota Ambon	Rp 50,455,935	Rp 50,455,935	Tersedianya data sektoral di lingkup pemerintah kota ambon	1 paket	Rp 50,439,500	99.97 %	1 paket	100 %	buku statistik sektoral terealisasi sebesar Rp. 50.439.500,-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN		Rp 118,276,525	Rp 118,276,525			Rp 67,176,091	56.80 %						
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Rp 118,276,525	Rp 118,276,525			Rp 67,176,091	56.80 %						
1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Ambon	Rp 118,276,525	Rp 118,276,525	Terlaksananya keamanan elektronik informasi pemerintah daerah kabupaten kota berbasis elektronik	1 paket	Rp 67,176,091	56.80 %	1 paket	100 %	SSL (Tanda tangan digital) terealisasi sebesar Rp. 67.176.091,-			

Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI KINERJA					KENDA LA	SOL USI	WAKTU PELAKSAN AAN
		PAGU SEBELUM (RP)	PAGU SETELAH (RP)	HASIL	VOLUME	PENYERAPAN DANA	DAN A (%)	FISIK	FIS IK (%)	HASIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL		Rp 10,776,709,677	Rp 13,293,350,04 4		-	Rp 12,111,150,114	91.11 %		96 %				

3.2.4 Evaluasi dan Analisis Rencana Aksi

**Tabel 3.7 Evaluasi dan Analisis Rencana Aksi
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Tahun 2023**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mengumpulkan dan Menyusun bahan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKPJ, LPPD, LAKIP) dari bidang secretariat, membuat dokumen perencanaan (RENJA), mengajukan okumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, dokumen perencanaan kepada pimpinan untuk ditandatangani, membayar uang lembur dan uang makan lembur kepada pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14.206.901
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Membayar gaji dan tunjangan kepada 23 ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.759.468.082
3.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Mengumpulkan dan Menyusun bagan untuk laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, membayar uang lembur dan uang makan lembur kepada pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.356.773

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan HPS dan spesifikasi teknis, proses lelang, kontrak, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		√												272.434.262
5.			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Membeli ATK untuk Disitribusikan ke Bidang dan sekretariat untuk kelancaran kegiatan kantor	√			√			√			√				35.325.764
6.			Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan	Fotocopi dan penjilidan	√			√			√			√				17.999.750
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melakukan perjalanan ke luar daerah untuk berkoordinasi dan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	223.324.000
7.		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Membayar tagihan kartu hallo dan paket zoom untuk zoom di kegiatan pemerintah kota ambon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	45.978.000
8.			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Koordinasi dengan BKPSDM; P3K Membuat surat permohonan kontrak kepada Walikota; P3K Menandatangani perjanjian kerja; Membayar gaji P3K dan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	438.288.372
9.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Merawat kendaraan dinas roda 4 (3 unit) dan pajak mobil dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	132.832.040

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Anggaran (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Merawat dan memelihara peralatan dan perlengkapan gedung kantor	√			√	√		√	√		√		√	14.920.000
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKASI																
1.			Pelayanan Informasi Publik	Membuat daftar agenda publikasi (Baliho/Spanduk)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.701.265.000
2.			Layanan Hubungan Media	Membuat surat penawaran Kerjasama (media cetak online dan elektronik)							√					√	1.600.000.000
3.			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Membuat kegiatan pembentukan KIM dengan kelurahan desa dan negeri						√							163.886.498
4.			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Menyusun agenda liputan; Menyiapkan konsep feature dan membuat video profil kerjasama Pemkot Ambon dengan DPRD Kota Ambon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	255.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sewa jasa untuk hosting ambon.go.id	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.224.200
1.			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Koordinasi dengan PT.Telkom, PT. Aplikasi Lintasarta dan PT.SINAR MAS DIRGANTARA ; Membuat Kontrak Kerja; Menyediakan Jaringan; Membayar tagihan internet dan intranet	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.858.150.208

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Anggaran (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan PT. AWS untuk migrasi server, pemeliharaan server dan AC ruang command center dan ruang server	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	248.521.000
3.			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Koordinasi dengan PT.Telkom untuk sewa dan pembelian paket untuk omnichannel dan call center	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	295.844.200
4.			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Mengikuti evaluasi awal, melakukan pengisian kuesioner, melakukan tinjauan lapangan terhadap manfaat dan dampak dari program smart city tahun 2023						√	√	√	√				37.588.376
5.			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menyusun KAK dan HPS pekerjaan rehabilitasi ruang command center dan pemeliharaan Videotron dan cctv	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	407.150.997
6.			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pembelian tagihan telpon untuk sms broadcast dan mencetak sticker untuk pemberitahuan layanan panguan						√						√	19.796.600
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, Pengumpulan data, Evaluasi terhadap kegiatan pengumpulan data, Analisis data statistic sektoral, Pembuatan laporan hasil pengumpulan data, penyusunan buku statistic sektoral								√	√				50.455.935
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan NoN Elektronik	Melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan BSSN terkait layanan keamanan informasi, proses pengadaan SSL untuk implementasi sertifikat elektronik, pemasangan sertifikat elektronik pada aplikasi, ujicoba				√									118.276.525

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Keberhasilan Kota Ambon yang ditetapkan masuk ke dalam Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia juga menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Melalui Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia, Kota Ambon telah memiliki *Master Plan* pengembangan *Ambon Smart City*, dengan menetapkan berbagai program unggulan pada masing-masing dimensi *smart city*. Dimensi *smart city* Kota Ambon meliputi : *smart governance*, *smart economy*, *smart branding*, *smart environment*, *smart society* dan *smart living*. Untuk nilai *smart city* Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di tahun 2023 adalah sebesar 2.87.

Dalam mendukung pelaksanaan *smart city* Pemerintah Kota Ambon membangun *command center*. Pembangunan *Command Center* merupakan salah satu implementasi program unggulan pada dimensi *smart governance*. Dimana pada fasilitas *command center* terdapat layanan integrasi aplikasi dan layanan CCTV. Pada tahun 2023 lokasi pemasangan CCTV sudah meningkat dari jumlah 32 CCTV di tahun 2022 menjadi 37 lokasi pemantauan CCTV. Lokasi pemasangan CCTV tersebut berada di lokasi sebagai berikut :

NO	LOKASI CCTV	NO	LOKASI CCTV
1	Dinas Kesehatan Kota Ambon	20	TPS Salobar
2	Depan Bank Maluku	21	Bawah Jembatan Merah Putih
3	Pertigaan Gereja Maranata	22	Jembatan 1 Rupiah
4	Depan Kantor Satpol PP	23	Depan Kantor Pariwisata Provinsi
5	DPRD Kota Ambon	24	TPS Batu Merah
6	Dinas PU Kota Ambon	25	Depan Capil
7	Pemadam Kebakaran Kota Ambon	26	TPS Waiheru
8	Pelabuhan Slamet Riyadi	27	Depan Indomart Wayame
9	Sungai Pohon Pule	28	Pertigaan Talake
10	Depan Abdullalie	29	Depan Balai kota Ambon
11	Petak 10	30	Pertigaan Kudamati
12	Sungai Batu Gantong	31	Kantor Negeri Batu Merah
13	Pertigaan Asabri	32	Indomart Tulukabessy

NO	LOKASI CCTV	NO	LOKASI CCTV
14	RSUD Halausy	33	Terminal A Pintu Masuk Pasar Mardika
15	Asmil OSM	34	Terminal B Pintu Masuk Pasar Mardika
16	Pertigaan Tulukabessy	35	Dalam Terminal B Pintu Masuk Pasar Mardika
17	SD Belakang Soya	36	Pertigaan Hotel Amans
18	Taman Pertigaan	37	Depan Lorong Pisang
19	Depan Gereja Eden		

Selain itu, telah dilakukan pemantauan secara terpusat seluruh aplikasi pelayanan public maupun internal pemerintahan. Aplikasi yang diintegrasikan pada command center antara lain : Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan (SIMAK), Aplikasi Monitoring Pajak Daerah, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIMANTAP), Layanan Laport SP4N, ambon.go.id, Omni Channel, wifi id, BMKG ITEWS, Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIMDATIK).

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon juga menyediakan layanan *wifi station* di area publik sebanyak 17 titik di wilayah Kota Ambon. Lokasi tersebut berada di Tribun VIP Lapangan Merdeka, Area Kantor Koni Kota Ambon, Taman Pattimura, Taman Patung Leimena, Taman Perumahan Lateri, Parkiran Balai kota Ambon, Taman Karang Panjang, Pusat Kuliner Tapal Kuda, Dermaga Amahusu, Kantor Kecamatan Sirimau, Kantor Kecamatan Nusaniwe, Kantor Kecamatan Teluk Ambon, Kantor Kecamatan Baguala, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat DPRD, Taman 1 Ambon, Pantai Wainitu. Dengan penyediaan layanan *wifi station* diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses internet di area publik sekaligus mempercepat transformasi digital di Kota Ambon.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 yang dialokasikan dalam pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran dalam pencapaian kinerja
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon
Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	Rp. 163.886.498,-	0	0 %
Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	Rp. 3.107.128.500,-	Rp. 3.057.028.500,-	98.38%
Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	Rp. 1.791.077.377,-	Rp. 1.347.737.794,-	75.25%
Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	Rp. 3.103.741.938,-	Rp. 2.872.481.103,-	92.55%
Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	Rp. 723.087.373,-	Rp. 529.046.664,-	73.16%
Persentase penyediaan sertifikat elektronik	Rp. 50.455.935	Rp. 50.439.500,-	99.98%
Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	Rp. 118.276.525	Rp. 67.176.091	56.80%

Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambo pada tahun 2023 sebesar dari total anggaran yang dialokasikan. Dari total belanja operasi sebesar Rp. 12.373.190.257,- terserap sebesar Rp. 11.299.906.114,- Dan belanja modal sebesar Rp. 920.159.787,- Terserap sebesar Rp.811.244.000,- Realisasi belanja total Dinas Komunikasi

Informatika dan persandian sebesar Rp.12.111.150.114,- dengan persentase 91.11%.

Realisasi anggaran untuk Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 87.01%; Program Aplikasi Informasi sebesar 91.03%; Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 99.97%; Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Pengamanan Informasi sebesar 56.80%. Sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 96.80%.

3.4.2 Analisis Efisiensi

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Sasaran
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)		Anggaran (Rp)				Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Capaian	Target	Realisasi	Efisiensi	Capaian (%)	
Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	90	68.18	Rp. 163.886.498,-	0	Rp. 163.886.498,-	0 %	0
Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	90	89.88	Rp. 3.107.128.500,-	Rp. 3.057.028.500,-	Rp. 50.100.000,-	98.38%	1.61%
Persentase pemanfaatan media social oleh OPD			Rp. 1.791.077.377,-	Rp. 1.347.737.794,-	Rp. 443.339.583,-	75.25%	24.75 %
Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah			Rp. 3.103.741.938,-	Rp. 2.872.481.103,-	Rp. 231.260.835,-	92.55%	7.45%
Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah			Rp. 723.087.373,-	Rp. 529.046.664,-	Rp. 194.040.709,-	73.16%	26.84 %
Persentase penyediaan sertifikat elektronik			Rp. 118.276.525,-	Rp. 67.176.091,-	Rp. 51.100.434	56.80%	43.20 %
Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah			Rp. 50.455.935	Rp. 50.439.500,-	Rp. 16.435,-	99.97%	0.03%

Dari table di atas, Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon telah mencapai kinerja sebesar 100% dan dikatakan **EFISIEN** dengan efisiensi anggaran sebesar

1. Indikator kinerja Persentase Pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan mencapai kinerja sebesar 0% dengan efisiensi anggaran Rp. 163.886.498,-. Untuk diketahui, tahun 2023 kegiatan ini tidak dijalankan dikarenakan adanya pergeseran kegiatan sehingga saat akan dilakukan kegiatan tersebut tidak ada ketersediaan anggaran di dinas dikarenakan pencairan anggaran hanya untuk prioritas kegiatan.
2. Indikator Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah telah mencapai kinerja sebesar 71.82 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 50.100.000,- atau 1.63%.
3. Indikator Persentase pemanfaatan media social oleh OPD telah mencapai kinerja sebesar 80% dengan efisiensi anggaran sebesar
4. Indikator Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah telah mencapai kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 231.260.835,-
5. Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah telah mencapai kinerja 164.78% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 194.100.434,-
6. Persentase sertifikat elektronik telah mencapai kinerja sebesar 65.03% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 51.100.434,-
7. Persentase Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah telah mencapai kinerja sebesar Rp. 287.87% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.435,-

3.5. Inovasi

Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik dan Urusan Persandian pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon telah embuat beberapa inovasi sebagai berikut :

1. Tanda Tangan Elektronik

Telah dilakukan aktivasi akun TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk pimpinan OPD sampai kepala Kecamatan yang nantinya akun tersebut diimplementasikan dalam korespondensi/surat menyurat aplikasi srikandi.

2. Pembangunan Satu Data Indonesia

Melalui satudata.ambon.go.id yang kemudian telah terintegrasi dengan portal satu data Indonesia (data.go.id) melalui system penghubung layanan pemerintah.

3. Pembuatan website untuk OPD lain

Dari tahun 2022 sesuai dengan keputusan peraturan kementerian kominfo bahwa pembuatan website dan aplikasi untuk setiap perangkat daerah harus melalui dinas komunikasi informatika dan persandian. Sehingga Dinas kominfo dari tahun 2022 telah mengambil alih untuk pembuatan website tiap-tiap Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

4. Omnichanel

Omnichanel merupakan strategi yang menghubungkan berbagai chanel atau saluran pengaduan Pemerintah Kota Ambon yang tidak terintegrasi SP4N-LAPOR secara online. Dengan fitur unggulan chat box (ngobrol langsung) memungkinkan Masyarakat terhubung dengan OPD terlapor, dan broadcast yaitu penyebaran informasi kepada Masyarakat keseluruhan kanal resmi pemkot ambon. Saluran yang terhubung dalam platform tersebut antara lain layanan public, hotline, chat, aplikasi dan web, mobile, dan medsos.

5. Call Center (08114706999)

Sebagai pusat layanan informasi resmi pemerintah Kota Ambon untuk menerima panggilan telepon (inbound call) dari pelapor. Semua percakapan tersimpan di cloud storage (suara dan nomor pelapor) dan semua pengaduan tersimpan di form.

3.6. Penghargaan

Dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon telah membantu Pemerintah Kota Ambon mendapatkan penghargaan bergengsi di tingkat Nasional yaitu penghargaan “Anugerah Anindhita Wistara Data” dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan predikat baik dengan nilai baik.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon pada tahun anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

LAKIP bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di urusan bidang komunikasi informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian. Secara umum, dapat dilihat bahwa rata-rata dari capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2023 adalah **Sangat Baik** dengan **capaian kinerja 100%**. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam penyediaan anggaran melalui APBD Kota Ambon guna meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat.
2. Komitmen dan kerja keras aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon untuk meningkatkan kinerja.
3. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan media (media cetak, media elektronik, media online)
5. Kerjasama yang baik dengan pihak swasta untuk peningkatan pelayanan informasi publik.

Demikian LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon ini kami susun, semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Ambon.

Ambon, Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA AMBON**



Ronald H. Lekransy, ST, M.Si
Pembina

NIP. 19760730 200604 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ronald H. Lekransy, ST, M.Si**

Jabatan : **Plt.Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si**

Jabatan : **Penjabat Walikota Ambon**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Januari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi
Informatika
dan Persandian Kota Ambon,**



Ronald H. Lekransy, ST, M.Si
NIP. 19760730 200604 1 020

Penjabat Walikota Ambon,

Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase Pembentukan KIM di tingkat desa/kelurahan	20%
		Persentase media masa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah	66.66%
		Pesentase pemanfaatan media social oleh OPD	45%
		Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	52.27%
		Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	60%
2.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	40%
3.	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah	Persentase ketersediaan data dalam satu portal satu data Indonesia	45%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.903.647.118,-	APBD
2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.337.526.320,-	APBD
3. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.231.843.628,-	APBD
4. Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 140.431.071,-	APBD
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 46.374.441,-	APBD

Penjabat Walikota Ambon,

Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si

Ambon, Januari 2024

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi
Informatika
dan Persandian Kota Ambon,**



**Ronald H. Lekransy, ST., M.Si
NIP. 19760730 200604 1 020**

**RENCANA AKSI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
TAHUN 2023**

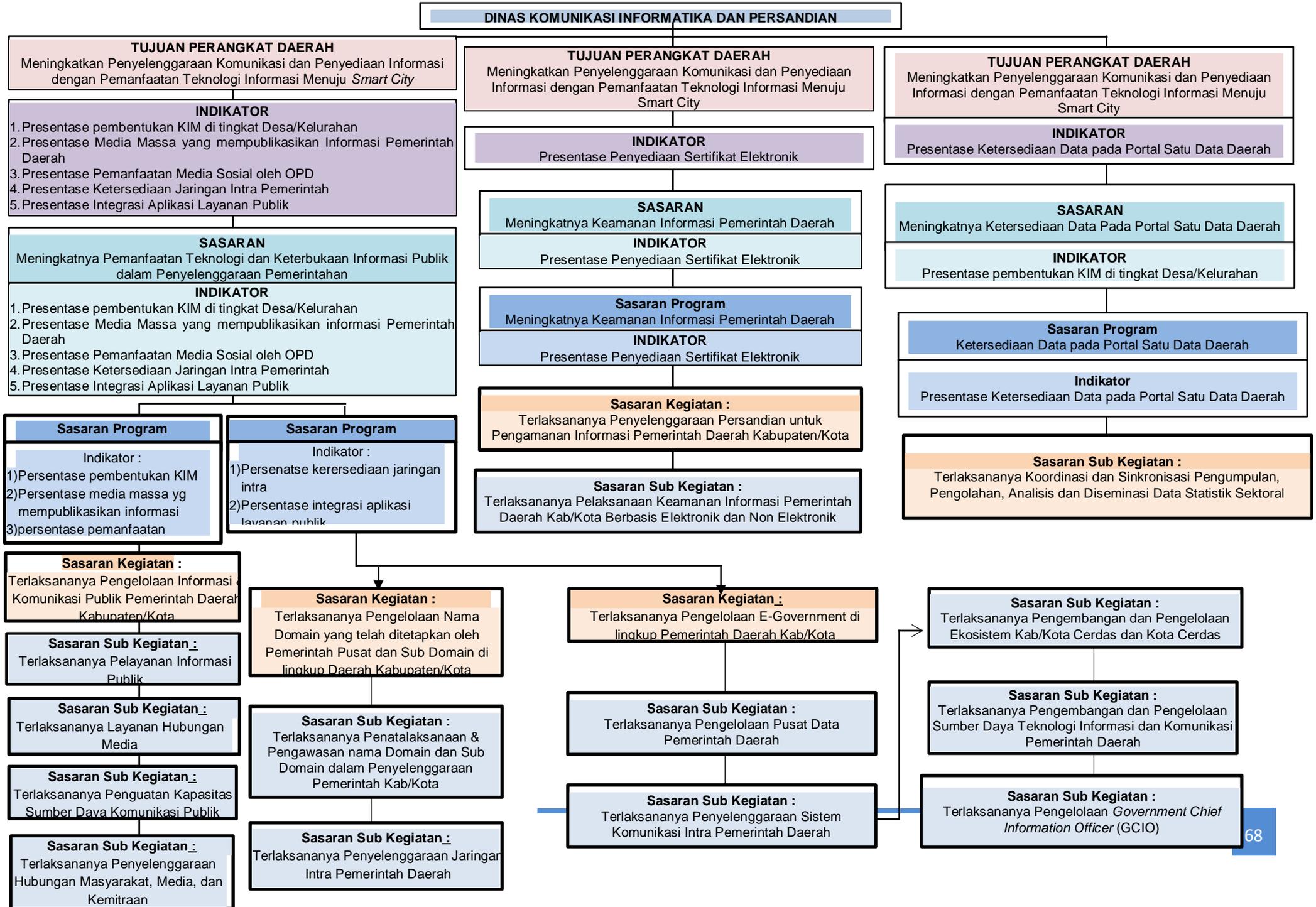
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Anggaran (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mengumpulkan dan Menyusun bahan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKPJ, LPPD, LAKIP) dari bidang secretariat, membuat dokumen perencanaan (RENJA), mengajukan okumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, dokumen perencanaan kepada pimpinan untuk ditandatangani, membayar uang lembur dan uang makan lembur kepada pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14.206.901
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Membayar gaji dan tunjangan kepada 23 ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.759.468.082
3.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Mengumpulkan dan Menyusun bagan untuk laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, membayar uang lembur dan uang makan lembur kepada pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.356.773
4.			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan HPS dan spesifikasi teknis, proses lelang, kontrak, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		√											272.434.262

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Anggaran (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Membeli ATK untuk Didistribusikan ke Bidang dan sekretariat untuk kelancaran kegiatan kantor	√			√			√			√			35.325.764
6.			Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Fotocopi dan penjiilidan	√			√			√			√			17.999.750
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melakukan perjalanan ke luar daerah untuk berkoordinasi dan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	223.324.000
7.		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Membayar tagihan kartu hallo dan paket zoom untuk zoom di kegiatan pemerintah kota ambon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	45.978.000
8.			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Koordinasi dengan BKPSDM; P3K Membuat surat permohonan kontrak kepada Walikota; P3K Menandatangani perjanjian kerja; Membayar gaji P3K dan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	438.288.372
9.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Merawat kendaraan dinas roda 4 (3 unit) dan pajak mobil dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	132.832.040
10.			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Merawat dan memelihara peralatan dan perlengkapan gedung kantor	√			√	√		√	√		√		√	14.920.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Anggaran (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKASI																
1.			Pelayanan Informasi Publik	Membuat daftar agenda publikasi (Baliho/Spanduk)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.701.265.000
2.			Layanan Hubungan Media	Membuat surat penawaran Kerjasama (media cetak online dan elektronik)							√					√	1.600.000.000
3.			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Membuat kegiatan pembentukan KIM dengan kelurahan desa dan negeri						√							163.886.498
4.			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Menyusun agenda liputan; Menyiapkan konsep feature dan membuat video profil kerjasama pemkot ambon dengan DPRD Kota Ambon	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	255.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sewa jasa untuk hosting ambon.go.id	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.224.200
1.			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Koordinasi dengan PT.Telkom, PT. Aplikanusa Lintasarta dan PT.SINAR MAS DIRGANTARA ; Membuat Kontrak Kerja; Menyediakan Jaringan; Membayar tagihan internet dan intranet	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.858.150.208
2.		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan PT. AWS untuk migrasi server, pemeliharaan server dan AC ruang command center dan ruang server	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	248.521.000
3.			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Koordinasi dengan PT.Telkom untuk sewa dan pembelian paket untuk omnichannel dan call center	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	295.844.200

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Anggaran (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Mengikuti evaluasi awal, melakukan pengisian kuesioner, melakukan tinjauan lapangan terhadap manfaat dan dampak dari program smart city tahun 2023							√	√	√	√			37.588.376
5.			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menyusun KAK dan HPS pekerjaan rehabilitasi ruang command center dan pemeliharaan Videotron dan cctv	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	407.150.997
6.			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pembelian tagihan telpon untuk sms broadcast dan mencetak sticker untuk pemberitahuan layanan pengauan							√					√	19.796.600
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kcamatan/Kota	Koordinasi dan Sinkronasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, Pengumpulan data, Evaluasi terhadap kegiatan pengumpulan data, Analisis data statistic sektoral, Pembuatan laporan hasil pengumpulan data, penyusunan buku statistic sektoral									√	√			50.455.935
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan NoN Elektronik	Melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan BSSN terkait layanan keamanan informasi, proses pengadaan SSL untuk implementasi sertifikat elektronik, pemasangan sertifikat elektronik pada aplikasi, ujicoba													118.276.525

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON



CASCADING
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PEERSANDIAN KOTA AMBON

RPD

Sasaran :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintah
2. Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
3. Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah

Indikator :

1. Persentase pembentukan KIM di tingkat desa/kelurahan
2. Persentase Media yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah
3. Persentase pemanfaatan media social oleh OPD
4. Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah
5. Persentase integrasi apliksai layanan public dan layanan pemerintah
6. Persentase penyediaan setifikat elektronik
7. Persentase ketersediaan data pada portal satu data

**RENSTRA/
Eselon II**

Strategis :

1. Pengelolaan Informasi dan komunikasi public yang efektif dan efisien
2. Pengelolaan dan pemanfaatan jaringan dan teknologi informasi
3. Peningkatan kualitas layana keamanan informasi pemerintah daerah diukur mellui indeks KAMI oleh BSSN
4. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan satu data daerah di seluruh OPD

Indikator :

1. Persentase pembentukan KIM di tingkat desa/kelurahan
2. Persentase Media yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah
3. Persentase pemanfaatan media social oleh OPD
4. Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah
5. Persentase integrsi apliksai layanan public dan layanan pemerintah
6. Persentase penyediaan setifikat elektronik
7. Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah



Eselon III

Program : Informasi dan Komunikasi Publik

1. Persentase pembentukan KIM di tingkat desa/kelurahan
2. Persentase media massa yang mempublikasikan informasi pemerintah daerah
3. Persentase pemanfaatan media social oleh OPD

Program : Aplikasi Informatika

1. Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah
2. Persentase integrasi aplikasi layanan

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten/ Kota

Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah

Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Persentase penyediaan sertifikat elektronik

Eselon IV

Sub Kegiatan :

1. Pelayanan Informasi Publik
2. Layanan Hubungan Media
3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
4. Penyelenggaraan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas

Sub Kegiatan :

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Jaringan Sistem Intra Pemerintah
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
6. Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
7. Pengelolaan Government Chief Information Officer

**Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Kabupaten/ Kota**

Indikator : Persentase keersediaan data pada portal satu data daerah

Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator : Persentase penyediaan sertifikat elektronik



PEMERINTAH KOTA AMBON
INSPEKTORAT

Jalan Rijali Nomor 29 Tlp/Fax (0911) 356361 Kode Pos 97121, Ambon

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022

PADA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KOTA AMBON

Nomor : 700/298 -Inspektot
Tanggal : 31 Juli 2023



PEMERINTAH KOTA AMBON

INSPEKTORAT

Jalan Rijali Nomor 29 Tlp/Fax (0911) 356361 Kode Pos 97121, Ambon

Ambon, 31 Juli 2023

Nomor : 700/ 298 -Inspekt
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2022

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian**
di
Ambon

A. PENDAHULUAN

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Ambon Nomor: 094/70 - Inspekt tanggal 07 Juli 2023 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah bagi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong instansi Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum, tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah Kota Ambon, untuk mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

JA

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja. Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian daerah terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

JAS

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Gambaran Umum Evaluasi

a. Profil OPD

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Alamat : Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon
Nama Kepala OPD : Drs. J. R. Adriaansz, M.Si
NIP : 19770320 199511 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IVc

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon dengan uraian, tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Ambon melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian.

BAF

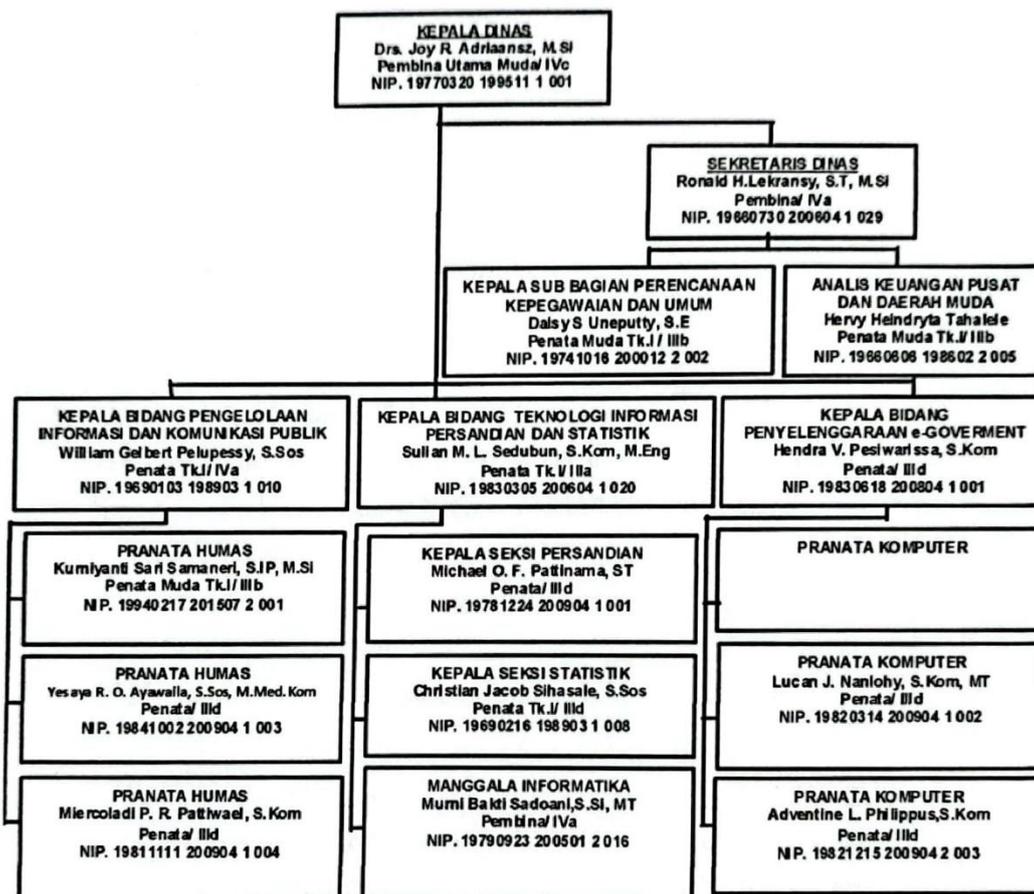
- **Fungsi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian.
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.



c. Struktur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon terdiri dari :



PA

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

- a. Kebijakan yang berkaitan dengan Penerapan Sistem AKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Sistem AKIP, yaitu :
 - Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2017 – 2022,
 - Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022,
 - Rencana Kinerja Tahun 2022,
 - Perjanjian Kinerja Eselon III, IV dan Individu Tahun 2022,
 - Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022,
 - LKIP Tahun 2022.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap temuan evaluasi tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon telah melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

- a. Pada Pengukuran Kinerja :
 - a) Melaksanakan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi yang dilakukan secara berkala;
 - b) Melakukan pengukuran kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas;
 - c) Melakukan pengukuran kinerja atas rencana aksi secara berkala.
- b. Pada Pelaporan Kinerja :
 - 1) Menyajikan informasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja;
 - 2) Menyajikan informasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja.
- c. Pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :
 - 1) Menyajikan perbaikan hasil evaluasi rencana aksi
 - 2) Perbaikan pelaksanaan program.

FA

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Kondisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah huruf B. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE poin 5, Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat APIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.

CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 21,00 dari bobot penilaian 30,00.

Penilaian atas Perencanaan Kinerja meliputi 3 sub komponen yaitu penilaian atas Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hasil penilaian atas 3 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	21,00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,20
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	6,30
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50

PA

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,00 dari bobot penilaian 30,00. Penilaian atas Pengukuran Kinerja meliputi 3 sub komponen yaitu Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil penilaian atas 3 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	2	3	4
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	21,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,20
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,30
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,50 dari bobot penilaian 15,00. Penilaian atas Pelaporan Kinerja meliputi 3 sub komponen yaitu Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil penilaian atas 3 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut :

FA

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	2	3	4
3	PELAPOPAN KINERJA	15,00	10,50
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,75 dari bobot penilaian 25,00.

Penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meliputi 3 sub komponen yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. Hasil penilaian atas 3 sub komponen tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	2	3	4
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,75
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,50
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00

f a q

2. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terus meningkatkan kinerja ditahun mendatang dan mendokumentasikan kegiatan evaluasi dengan notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan OPD, sesuai Contoh Form E.81 (hal. 628) dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen terhadap komponen dan sub komponen penilaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hasil Evaluasi SAKIP atas 4 (empat) komponen besar (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) diperoleh nilai 71,25.
- b. Nilai Evaluasi SAKIP 71,25 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagian Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE, penilaian dan Penyimpulan termasuk kategori **BB (Sangat Baik)**.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
- d. Pada Perencanaan Kinerja :
 - a) Meningkatkan Kualitas Perencanaan
- e. Pada Pengukuran Kinerja :
 - a) Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja
- f. Pada Pelaporan Kinerja :
 - a) Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja
- g. Pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :
 - a) Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

SAI

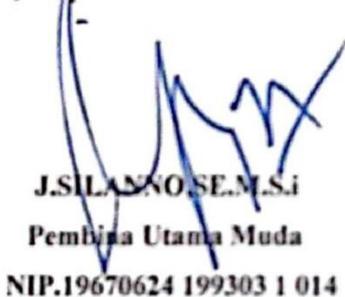
2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Sampaikan motivasi atau trik yang bisa dilakukan untuk mengembangkan yang sudah baik dan meningkatkan yang masih kurang/belum terlaksana, terutama komponen yang masih memiliki predikat kurang.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2022 sebagai laporan.

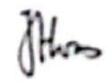
Mengetahui

Inspektur Kota Ambon



J. SILANNO S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670624 199303 1 014

Ketua Tim



J.J. UNEPUTTY, S.Sos
NIP.19750223 200003 2 008

PENGHARGAAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA TAHUN 2023

Penghargaan Anugerah Anindhita Wistara Data” dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dengan predikat baik dengan nilai baik



DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON 2023

1. Kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (workshop)



2. Kegiatan Bidang E-government (Evaluasi Smart city tahap 1)



3. Kegiatan E-gov (Evaluasi smart city tahap 2)



4. Kegiatan Bidang E-gov (Riset kota cerdas Bersama ITB)



5. Kegiatan Bidang Teknologi Informasi Statistik dan Persandian (Pembinaan Statistik Sektoral)



6. Kegiatan Bidang Informasi Statistik dan Persandian (Penilaian Interview Statistik Sektoral Bersama TPI EPPS dan Buru Selatan)



SK TIM PENYUSUSNAN LAKIP



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 Telp. (0911) 345289 Fax. (0911) 343969 Website: www.ambon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA AMBON
NOMOR : 33 /DKIP/2024

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON
TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Penjabat Wali Kota Ambon, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon
 - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penyusun LAKIP di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan.

KEDUA

: Tim Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Penyusunan LAKIP di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.

KETIGA

: Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Penyusun LAKIP.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Februari 2024

Pt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA
AMBON
NOMOR : 33 /DKIP/2024
TANGGAL : Februari 2024

**TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON**

NO	POSISI DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggung Jawab	Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon
3.	Sekretaris	Kasubag Perencanaan Kepegawaian dan Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi, Persandian dan Statistik 4. Kasubag Keuangan dan Aset 5. Penyusun Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kota Ambon



Ronald H. Lekransy, ST., Msi
AMBON Pembina
NIP. 19760730 200604 1 020

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KOTA
AMBON

NOMOR : 33/DKIP/2024
TANGGAL : Februari 2024

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI
LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA AMBON**

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon sebagai berikut :

1. Setiap triwulan disusun laporan kinerja interim yang bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulan dan pada akhir tahun disusun laporan kinerja secara berjenjang :
 - a. Dari Eselon III ke Eselon II
 - b. Dari Pejabat Fungsional ke Eselon II melalui Eselon III
 - c. Dari pejabat Eselon IV ke eselon III
 - d. Dari Staf Ke Pejabat Eselon IV
2. Pengukuran Kinerja setidaknya menyajikan Indikator Kinerja Individu dengan target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja Individu ataupun *Action Plan*, serta dilakukan rekap capaian kinerja dan keuangan untuk setiap aksi sesuai Rencana Aksi (*action plan*);
3. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode kecuali untuk Laporan Kinerja akhir tahun paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun;
4. Setiap laporan wajib dilengkapi dengan data pendukung secara akurat dan berkualitas dan telah disahkan baik dalam bentuk hardcopy maupun soft copy;
5. Laporan tersebut dari pejabat dibawah eselon II dilakukan verifikasi dan reviu oleh Tim Penyusunan LAKIP untuk perbaikan sebelum laporan kinerja tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas dan kemudian di kumpulkan pada Bagian Organisasi, proses tersebut paling lama 7 (tujuh hari) setelah disampaikan;
6. Tim Penyusun LAKIP melakukan penagihan dan mengusulkan reward and punishment pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon atas kinerja yang tercapai dan atau tidak tercapai.

Pt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kota Ambon



Ronald H. Lekransy, ST., M.Si

M B Pembina

NIP. 19760730 200604 1 020